

PERENCANAAN PENDIDIKAN

A. Pengertian Perencanaan Pendidikan

Perencanaan merupakan salah satu proses dalam fungsifungsi manajemen. Sebelum manajer melaksanakan aktivitas pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, maka aktivitas pertama manajer adalah melakukan perencanaan. Perencanaan merupakan langkah dan proses yang sangat fundamental untuk mencapai tujuan organisasi. Mengingat posisi perencanaan yang sangat penting dan utama, maka setiap perencanaan harus dilakukan dengan cermat melalui analisis yang mendalam tentang tindakan atau aktivitas apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Selain pertanyaan apa yang harus dilakukan, pertanyaan elementer yang lain seperti: kapan suatu aktivitas dilakukan, bagaimana melakukan aktivitas, dan siapa yang melakukan aktivitas tersebut, merupakan pertanyaan *esensial* dalam setiap perencanaan. Dengan kata lain, setiap perencanaan harus memiliki unsur-unsur yang dimanifestasikan dalam pertanyaan 5 W, dan 1 H yaitu: Apa (*What*), Kapan (*When*), Mengapa (*Why*), Dimana (*Where*), Siapa (*Who*), dan Bagaimana (*How*).

Secara sederhana perencanaan dapat dirumuskan sebagai suatu proses menetapkan tujuan yang ingin dicapai, penetapan tindakan, dan pengalokasian sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dari rumusan tersebut, terdapat tiga kegiatan perencanaan, yaitu: Pertama, perumusan tujuan yang ingin dicapai organisasi. Kedua, penentuan dan pemilihan program tindakan untuk mencapai tujuan. Ketiga, mengidentifikasi kasi dan mengerahkan sumberdaya yang jumlahnya terbatas untuk mencapai tujuan.

Untuk menambah wawasan terkait pengertian perencanaan, berikut disajikan beberapa rumusan tentang perencanaan, yaitu:

1. Buford and Bedeian (1988: 27), *Planning has been defined as the process of determining organizational objectives and selecting a future course of action for their accomplishment.* Perencanaan didefinisikan sebagai proses menentukan tujuan organisasi dan memilih tindakan untuk mencapainya.
2. Allen (1958, dalam Manulang, 1992: 47), *Planning is the determination of a course of action to achieve desired result.* Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan.
3. Gordon (1990 : 107) mengartikan perencanaan sebagai *“process determining in advance what should be accomplished and how it should be realized”.*
4. Stoner (1995: 10), Perencanaan adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran.
5. Koontz dan Donnel (Dalam Manulang, 1992: 48), *Planing is the function of a manager which involves the selection from among alternatives of objectives, policies, procedures, and programs.*

Perencanaan adalah fungsi seorang menejer yang berhubungan dengan pemilihan berbagai alternatif tujuan, kebijakan, prosedur dan program.

6. Atmosudirjo (1975: 107 - 108), Perencanaan adalah aktivitas untuk menentukan apa yang hendak dicapai, apa yang harus dijalankan, fasilitas apa yang diperlukan, mengapa harus dicapai dan dijalankan, bilamana waktunya, dan bagaimana melaksanakannya.

Sementara itu, Gordon (1990: 116) juga menguraikan bahwa perencanaan harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini :

1. What activities are required to accomplish the objectives?
2. When should these activities be carried out?
3. Who is responsible for doing what?
4. Where should the activities be carried out?
5. When should the action be accomplished?

Merujuk pengertian perencanaan para pakar di atas, secara sederhana perencanaan pendidikan dapat dirumuskan sebagai proses dan aktivitas manajerial pendidikan yang menetapkan tujuan, tindakan yang akan dilakukan, dan penggunaan sumberdaya termasuk menyediakan fasilitas dan lingkungan tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara yang efektif dan efisien di lembaga pendidikan. Dari pengertian perencanaan pendidikan tersebut mengandung pokok-pokok pikiran: Pertama, perencanaan pendidikan merupakan dasar dari fungsi manajemen, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan pendidikan. Kedua, perencanaan pendidikan berorientasi ke masa depan, dengan meramalkan (*forecasting*) bentuk dan sifat yang diinginkan organisasi pendidikan di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ketiga, perencanaan pendidikan memerlukan tindakan sebagai aplikasi perwujudan perencanaan itu sendiri dan dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melaksanakannya. Keempat, perencanaan pendidikan merupakan usaha-usaha untuk mencapai tujuan pendidikan agar lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya untuk menambah wawasan, berikut ini dipaparkan rumusan para ahli, tentang pengertian perencanaan pendidikan, sebagai berikut:

1. Guruge (1972), ... *definition of educational planning is the process of preparing decision for action in the future in the field of educational development*. Perencanaan pendidikan adalah proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pengembangan pendidikan.
2. Coombs, (dalam Saúd dan Makmum, 2005: 8), Perencanaan pendidikan adalah suatu penerapan yang rasional dan sistematis dalam proses pengembangan pendidikan yang bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendidikan.
3. Fattah (2001: 50), Perencanaan pendidikan adalah keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu tertentu agar penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien serta menghasilkan lulusan yang bermutu, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan

B. Prinsip-Prinsip Perencanaan Pendidikan

Terry (1967: 12) mendefinisikan prinsip-prinsip sebagai pernyataan fundamental yang menjadi pedoman tindakan.

Merujuk pendapat Terry ini, jika dihubungkan dengan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan adalah merupakan nilai, norma, dan dasar-dasar yang menjadi pedoman tindakan dalam menyusun perencanaan pendidikan baik pada tingkat sekolah atau madrasah, dinas pendidikan di tingkat kota/kabupaten, dinas pendidikan provinsi, maupun perencanaan pendidikan tingkat nasional.

Adapun prinsip-prinsip perencanaan pendidikan tersebut adalah:

1. Efektif dan Efisien. Prinsip ini mengandung arti bahwa, setiap perencanaan pendidikan harus mengarah terhadap pencapaian tujuan organisasi pendidikan. Disamping itu, penggunaan sumberdaya harus diusahakan secara efisien dalam mencapai tujuan organisasi.
2. Interdisipliner: Pendidikan pada hakikatnya merupakan pembangunan sumberdaya manusia. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan diharapkan dilakukan dengan penuh kecermatan, ketelitian, dan kemampuan menerjemahkan kebutuhan di masa depan yang bermanfaat untuk peserta didik di kemudian hari. Untuk itu, dibutuhkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dalam menyusun perencanaan pendidikan.
3. Fleksible: Pendidikan diharapkan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Artinya pendidikan diharapkan mampu menangkap aspirasi masyarakat melalui perencanaan yang fleksible, dinamis, lentur, dan aspiratif dengan kebutuhan masyarakat.
4. Obyektif, rasional, dan didasarkan data: Perencanaan pendidikan harus didasarkan pada kepentingan peserta didik, dan didasarkan pada data dan informasi yang obyektif dan rasional.
5. Komprehensif: Perencanaan pendidikan diharapkan memperhatikan semua aspek esensial pendidikan.
6. Didasarkan kekuatan sendiri. Perencanaan pendidikan seharusnya memperhatikan kelemahan, kekuatan, dan potensi yang dimiliki organisasi pendidikan. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan harus didasarkan pada kekuatan-kekuatan yang dimilikinya.
7. Menghimpun kekuatan-kekuatan secara terorganisir. Pada prinsipnya perencanaan pendidikan merupakan proses menghimpun kekuatan-kekuatan internal maupun eksternal organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan.
8. Didasarkan sumber daya yang ada. Perencanaan pendidikan diharapkan berdasarkan sumberdaya yang dimiliki organisasi, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia.

C. Fungsi Perencanaan Pendidikan

Hakikatnya perencanaan pendidikan merupakan aktivitas manajerial pertama dan utama dalam praktek-praktek manajemen. Setidaknya ada empat fungsi perencanaan pendidikan, yaitu:

1. Memberi arah yang jelas. Perencanaan pendidikan berfungsi sebagai acuan dan arah untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks persekolahan, perencanaan pendidikan merupakan pedoman para kepala sekolah, guru, dan staf dalam melaksanakan kegiatan di lembaga pendidikan.
2. Menjadi acuan apakah tujuan sudah tercapai atau belum.
Perencanaan pendidikan berfungsi sebagai pedoman apakah suatu tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum. Dengan kata lain, perencanaan pendidikan dapat digunakan sebagai dasar instrumen untuk melihat suatu tujuan tercapai atau belum.
3. Perencanaan pendidikan berfungsi memudahkan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan organisasi atau lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya.
4. Memudahkan untuk mengontrol dan mengevaluasi. Perencanaan pendidikan berfungsi untuk memudahkan para manajer pendidikan untuk melakukan evaluasi, dan kontrol terhadap efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan pendidikan. Praktisnya perencanaan pendidikan dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman untuk mengevaluasi dan mengontrol organisasi pendidikan.

D. Jenis Perencanaan Pendidikan

Pada bagian ini dikemukakan jenis perencanaan pendidikan dilihat dari berbagai sudut pandang. Beberapa jenis perencanaan pendidikan yang layak diketahui adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan proses penyusunan perencanaan pendidikan: Ada tiga jenis perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan *Button Up*. Perencanaan ini didasarkan atas masukan-masukan dari bawah. Dengan kata lain, perencanaan yang disusun berdasarkan masukan dari para guru, dan staf pendidikan. Kedua, perencanaan *Top Down*, yaitu perencanaan yang disusun dari tingkat pusat, dan dilaksanakan di tingkat bawah. Atau perencanaan yang direncanakan kepala sekolah tanpa masukan dari guru, staf sekolah. Ketiga, perencanaan gabungan antara *Button Up* dan *Top Down*, yaitu perencanaan yang disusun bersama-sama antara atasan dan bawahan. Artinya dalam konteks persekolahan, perencanaan ini disusun bersama-sama antara kepala sekolah, guru, dan staf sekolah. Jenis perencanaan yang ketiga ini sangat cocok dengan dengan pilar pendidikan bahwa, guru, dan staf adalah mitra kepala sekolah.
2. Ditinjau dari tingkatan perencanaan pendidikan: Perencanaan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Pertama perencanaan strategik atau biasanya disebut renstra (Rencana Strategik). Perencanaan strategik terdiri dari beberapa komponen, yaitu; visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi. Menurut R. G. Murdick J. E Ross (Dalam Fatah, 2000: 55) perencanaan strategik diartikan sebagai konfi gurasi tentang hasil yang diharapkan tercapai di masa depan. Langkah-langkahnya meliputi : (1) Analisis keadaan sekarang dan yang akan datang, (2) identifi kasi kekuatan dan kelemahan organisasi, (3) mempertimbangkan norma-norma (4) identifi kasi kemungkinan dan risiko, (5) menentukan ruang lingkup hasil dan kebutuhan masyarakat, (6) menilai faktor-faktor penunjang, (7) merumuskan tujuan dan kriteria keberhasilan, dan (8) menetapkan penataan distribusi, sumber-sumber. Kedua, perencanaan manajerial. Perencanaan ini ditujukan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan, sehingga

tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ketiga, perencanaan operasional, yaitu, perencanaan memusatkan pada apa yang akan dikerjakan pada tingkat pelaksanaan di lapangan dari rencana strategik. Perencanaan operasional bersifat spesifik dan berfungsi untuk memberikan petunjuk kongkret tentang bagaimana suatu program dilaksanakan menurut aturan, prosedur dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan secara jelas sebelumnya.

3. Dilihat dari besaran perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan ada tiga jenis. Pertama, perencanaan makro, yaitu perencanaan yang lingkupnya nasional. Dalam perencanaan makro ditetapkan kebijakan, tujuan, dan cara-cara mencapai tujuan pada tingkat nasional. Pada perencanaan makro setidaknya terdiri: (1) tujuan pendidikan nasional, (2) pendekatan untuk mencapai tujuan nasional, (3) lembaga pendidikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan nasional, (4) pengelolaan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan nasional, (5) program-program yang diperlukan untuk menunjang pencapaian tujuan nasional, (6) sumberdaya yang digunakan, dan (7) kriteria atau standar keberhasilan tujuan pendidikan nasional. Kedua, perencanaan meso, yaitu perencanaan yang menjabarkan perencanaan makro ke dalam program yang berskala lebih kecil dan bersifat operasional. Perencanaan meso mencakup wilayah tertentu (Pidarta, 1990: 65), bersifat regional misalnya tingkat propinsi atau kota dan kabupaten. Jadi perencanaan meso merupakan penjabaran perencanaan makro dan bersifat regional. Ketiga, perencanaan mikro, perencanaan yang mencakup satu lembaga pendidikan bersifat institusional. Jadi perencanaan mikro merupakan perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan meso.
4. Berdasar pendekatan. Perencanaan pendidikan dapat dibagi menjadi empat jenis. Pertama, pendekatan tuntutan sosial. Perencanaan ini lebih menekankan pemerataan dan bersifat kuantitatif. Kedua, pendekatan ketenagaan. Pendekatan ini menekankan keterkaitan lulusan dengan kebutuhan tenaga kerja. Ketiga, pendekatan untung rugi. Pendekatan yang bersifat ekonomi berbasis investasi. Perencanaan pendidikan didasarkan perspektif ekonomi. Keempat, pendekatan efisiensi dan efektifitas.
5. Berdasarkan jangka waktu. Perencanaan pendidikan dapat diklasifikasi menjadi tiga, yaitu perencanaan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek.

E. Proses Perencanaan Pendidikan

Menurut Buford and Bedeian, (1988: 41 - 52), rangkaian kegiatan yang logis dalam membuat perencanaan adalah (1) tahapan penetapan tujuan, (2) penyusunan premis-premis, (3) pengambilan keputusan, (4) penetapan serangkaian tindakan, dan (5) evaluasi hasil. Selanjutnya uraian proses perencanaan pendidikan didasarkan pada tahapan-tahapan yang dikemukakan Buford dan Bedeian, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Tahap Penetapan Tujuan

Tahap penetapan tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau sekolah. Tujuan harus dirumuskan secara jelas baik secara umum maupun secara operasional. Tujuan umum merupakan kegiatan organisasi yang telah ditetapkan pada waktu tertentu, bersifat tetap, dan tidak dapat dihitung secara realistis pembiayaannya, dalam. Tujuan ini bermanfaat sebagai sumber legitimasi, pedoman tindakan, memberi standar kerja, sumber motivasi, dan sebagai bahan perbandingan antara harapan dan kenyataan. Sedangkan tujuan

operasional merupakan tujuan yang secara aktual diupayakan oleh organisasi melalui operasional kebijakan, langkah kongkrit untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan ini umumnya mudah berubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi.

2. Penyusunan premis-premis

Penyusunan premis-premis merupakan pernyataan tentang gambaran masa depan yang ingin dicapai, rumusan nyata tentang masa depan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi sesuai filosofis yang mendasarinya sebagai kerangka untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyeleksi tindakan-tindakan yang tepat bagi tercapainya tujuan. Premis dalam perencanaan diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Pembuatan Keputusan

Pembuatan Keputusan merupakan kegiatan dalam hal mendefinisikan masalah, menganalisa masalah, mengembangkan alternatif pemecahan masalah, pemilihan alternatif yang tepat dari berbagai alternatif yang ada. Oleh karena itu, perlu disusun prosedur yang tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah. Pembuatan keputusan merupakan berkaitan dengan pemilihan alternatif yang tepat, baik berkaitan dengan tujuan maupun metode.

4. Penetapan Tindakan

Penetapan serangkaian kegiatan merupakan implementasi perencanaan di lapangan. Oleh karena itu, harus bersifat wajar, efektif, dan dituntut adanya komitmen yang tinggi. Penetapan suatu masalah sangat tergantung pada kemampuan seorang pimpinan, oleh karena itu perlu keberanian, ketegasan garis komando yang jelas agar penerapan perencanaan dapat efektif.

Perencanaan dapat mengalami kegagalan, akibat penerapan yang tidak baik, kesalahpahaman para pelaksana dan kurangnya motivasi dalam mengimplementasikan rencana. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk melibatkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan suatu rencana. Begitu juga dalam perencanaan mutu pendidikan perlu melibatkan orang tua dan warga sekolah lainnya, agar pelaksanaan peningkatan mutu berjalan dengan baik.

5. Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil diperlukan untuk memberikan balikan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan suatu rencana. Suatu rencana harus dapat dievaluasi secara terus menerus, baik pada waktu pelaksanaan maupun pada saat berakhirnya pelaksanaan. Evaluasi sangat berguna untuk melihat kemajuan, kegagalan suatu rencana dan mendeteksi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan.